



# **Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan tahun 2022**

The role of the village government in empowerment of farmer group in Sri Bintang Village, Teluk Sebong District Bintan District in 2022

**Adi Sugiarno<sup>1</sup>, Nazaki<sup>2</sup>, Yudhanto Satyagraha Adiputra<sup>3</sup>**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email Correspondence: [adisugiarno03@gmail.com](mailto:adisugiarno03@gmail.com)

## **Abstract**

*This research aims to determine the role of the Village Government in Empowering the Farmer Group community through 4 (four) role indicators, the role of the Village Government as Regulator, Dynamisator, Facilitator and the role of the Village Government as a Catalyst in empowering farmer groups in Sri Bintang Village, Teluk Sebong District, Bintan Regency. The method used is a qualitative descriptive method with 7 (seven) informants and using data collection techniques and tools in the form of observation, interviews and documentation. The results of the research show that the role of the Village Government in empowering farmer groups has been running but is not yet optimal. For the government's role as a regulator, there are already authorities and regulations for community empowerment, one of which is in developing farming communities to form farmer groups. Furthermore, the dynamist aspect for implementing the dynamator. The Village Government has carried out these activities but it is not yet in accordance with what the farming group community wants. Furthermore, in the facilitator aspect, the Village Government has also implemented it by providing facilities for the farmer group community to use, but in its implementation not all farmer groups have experienced the services provided. Then, for the catalytic aspect, the Village Government has supported and given attention to farmer groups to be able to unite so that they can progress further because the potential of natural resources and human resources can be developed.*

**Keywords:** *The Role, Of Village Governement, Empowerment of Power Groups*

## **Pendahuluan**

Desa mempunyai kewenangan yang sudah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan khusus Desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada bab IV pasal 18 dalam isi peraturan Perundang-Undangan dikatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fauzi, 2019). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 19 menyebutkan bahwa desa memiliki empat kewenangan, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul (rekognisi), kewenangan lokal berskala desa (subsidiarity), kewenangan yang tunjuk oleh pemerintah dan kewenangan lain dari instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum kewenangan desa dalam Pemberdayaan terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Pasal 18 hingga pasal 22 yang menyebutkan bahwa "kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa". Pemerintah Desa mempunyai peran aktif dalam menganalisis serta mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan juga menghambat proses pemberdayaan itu sendiri. Salah satu langkah dalam memecahkan masalah pertanian adalah dengan pembentukan kelompok tani.

Desa lahir setelah pertanian dikenal di masyarakat, desa sebagai tempat tinggal atau tempat menetap sangat erat hubungannya dengan pertanian. Keterkaitan yang erat antara keberadaan desa dan pertanian membuat masyarakat menjadi lebih mengidentifikasi desa dengan pertanian. Karena pada pendapat umum masyarakat menyatakan bahwa penduduk desa adalah petani dan petani adalah penduduk Desa (Usman, 2012).

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 salah satu tugas Kepala Desa dalam penguatan masyarakat desa adalah membentuk kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas petani. Perannya adalah menjadi wadah untuk diskusi antar petani yang memiliki tujuan dan minat yang sama.

Dalam perencanaan pembangunan desa pertanian juga terkait didalamnya karena dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 79 menyebutkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan memperhatikan yaitu mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, dan program pemerintah/pemerintah daerah berskala lokal desa di koordinasikan dan/didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.

Pada Bab XIV pasal 112 ayat 3 dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah, Pemerintah Daerah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan, menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa.

Langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan perannya melalui Pemberdayaan kelompok tani adalah sangat penting apabila ingin membuat kemajuan pada bidang pertanian dan kesejahteraan manusia.

Adanya penguatan kelompok tani akan mempengaruhi kemajuan desa yang masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Kemajuan desa berhubungan erat dengan adanya pembangunan di desa yang melibatkan Pemerintah Desa sebagai pemeran utama sebagai penanggung jawab dan juga sebagai fasilitator yang tujuannya untuk menjadikan desa semakin berkembang dan terus maju sehingga masyarakat merasakan kesejahteraan..

Dalam mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif (Tadanugi, 2018). Yang pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan, yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan masyarakat), baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik maupun mentalnya (Rosidin, 2019).

Dalam melakukan pemberdayaan kepada kelompok taninya, Pemerintah Desa Sri Bintan bersama petani harus bekerjasama untuk mengelola dan mengembangkan sektor pertanian yang ada, supaya dapat menjadi sumber pendapatan yang dominan bagi masyarakat, Khususnya yang bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian desa juga dapat memperoleh pendapatan asli desa melalui kerjasama yang dilakukan tersebut.

Mata pencaharian masyarakat di Desa Sri Bintan sebanyak 168 orang adalah sebagai petani. dan dilihat dari wilayah desa yang mempunyai potensi untuk pertanian, Pemerintah Desa harus bisa melaksanakan program-program untuk memperkuat masyarakat petani yang tergabung di kelompok tani Desa Sri Bintan.

Tabel 1. Nama Kelompok Tani di Desa Sri Bintan 2022

No	Nama kelompok tani	Nama ketua	Tahun berdiri	Jenis kelompok	Kelas kelompok
1	Jati Mulyo	Poniman	2006	Perkebunan	Pemula
2	Kwt Mawar	Siti Amniah	2019	Kebun kwt	Pemula
3	Sumber Tani	Suprayitno	2022	Holtikultura	Pemula
4	Kwt Sumber Rezeki	Tumirah	2017	Kebun kwt	Pemula
5	Mekar Jaya	Pebriono	2020	Perkebunan	Pemula
6	Poyotomo Makmur	Ali Aspan	2012	Perkebunan	Pemula
7	Sekuning Makmur	Sumarno	2007	Perkebunan	Pemula
8	Sri Rezeki	Mispani	2011	Perkebunan	Pemula

Sumber: wawancara dengan pemerintah Desa Sri Bintan, (tanggal 19 Maret 2023)

Melalui observasi awal yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana gambaran lokasi penelitian, subjek penelitian dan mengetahui sekilas tentang pemberdayaan kelompok tani di Desa Sri Bintan. diperoleh data serta informasi awal yang berkaitan dengan kelompok tani bahwa di Desa Sri Bintan terdapat 8 kelompok Tani dengan tanaman Perkebunan dan juga buah-buahan, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 10-15 anggota yang kelompoknya

terdaftar dan teregritasi di Kantor Desa Sri Bintan. Dari 10-15 anggota kelompok tani tersebut terbagi atas tugas-tugas masing-masing dimana ada yang menjadi ketua kelompok, menjadi sekertaris, menjadi bendahara, dan sisanya menjadi anggota kelompok tani.

Anggota kelompok tani di Desa Sri Bintan masih menjalankan kesehariannya sebagai petani dan sebagian diantaranya sudah tidak beroprasi dengan kelompoknya. Berdasarkan dari wawancara Dari kelompok tani yang masih aktif tersebut penyebab dari tidak beroprasionalnya kelompok tersebut dikarenakan anggota dari kelompok bekerja ditempat lain dan belum keterlibatan keseluruhan kelompok tani pada kegiatan sekolah lapangan terkait pertanian, kemudian belum diadakan pembinaan yang berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan dalam mengola usaha taninya. Karena pada saat diadakan pelatihan-pelatihan atau sosialisasi, yang ditunjuk untuk menghadiri adalah dari ketua kelompoknya atau orang tertentu yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan tersebut. Salah satu anggota kelompok tani juga mengatakan bahwa dalam pemberian subsidi pupuk masih dibatasi untuk pengambilannya. Kemudian selain pupuk subsidi ada juga bantuan berupa bibit, yang masih belum merata. Sehingga menyebabkan petani di Desa Sri Bintan masih belum memiliki kemampuan untuk mengelola usaha taninya.

Pemerintah Desa Sri Bintan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa, pelaksanaannya masih menimbulkan tanda tanya untuk pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakatnya yang sudah tergabung di kelompok tani. Hal tersebut terlihat dari kelompok tani yang menjadi aktor pemberdayaan, karena dalam pelaksanaannya ada yang merasa berdaya dan ada yang tidak merasakan pemberdayaan yang dilakukan. Sebab masih ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani kepada Pemerintah Desa sebagai pelaku pemberdaya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani dilihat dari peran Pemerintah Desa sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator Di Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.

### **Metode Penelitian**

Dalam proses melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode Penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Menurut Meleong dalam (Widarni, 2021) Penelitian kualitatif merupakan penelitian di mana sikap, kepercayaan, dan perilaku individu ataupun kelompok diperiksa dan dipahami melalui wawancara terbuka. Pada penelitian ini objeknya adalah kelompok tani, dan untuk lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Sri Bintan.

Kemudian Fokus penelitian diperlukan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data sehingga peneliti dapat fokus dalam menghadapi masalah yang ada, sesuai dengan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. maka fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah Desa Sri Bintan Dalam Pemberdayaan Kelompok Taninya.

Penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu, data primer dan data sekunder Menurut (Sugiyono, 2016) . Kemudian peneliti akan menggunakan

teknik Triangulasi data yang merupakan kombinasi wawancara, observasi dan pengamatan dokumenter di dalam penelitian ini. Untuk informan akan dipilih dengan teknik *purposive*, yaitu melalui pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian untuk dijadikan sebagai sumber data.

Analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

## Pembahasan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis lain akan mendasari pemikiran penulis baik itu dalam bentuk skripsi maupun jurnal, sehingga akan didapatkan keterkaitan yang dapat di jadikan referensi dasar penulis dalam menyusun penelitian ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Liwu & Sasmito, 2019)	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani	Menunjukkan bahwa tindakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk memperkuat kelompok tani sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena dalam pelaksanaannya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa masih memiliki faktor penghambat dalam menjalankan pemberdayaan tersebut. Dan tujuan dari dilakukan strategi Pemerintah Desa untuk pemberdayaan kelompok tani tersebut supaya dapat mencapai hasil yang optimal.
Adapun titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan, kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk perbedaannya adalah terletak pada aspek pemberdayaan yang dibahas, diantaranya adalah membahas tentang pemberdayaan masyarakat petani, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti ini adalah lebih terfokus pada pemberdayaan kelompok tani di Desa Sri Bintan.			
2	(Pebriyani & Hermawan, 2021)	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung	Hasil penelitian ini berisi tentang Pemerintah Desa Tirtawangunan yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani, sudah mampu mengoptimalkan program pemberdayaan namun masih sedikit terhambat dalam pelaksanaan programnya, karena saat itu sedang berada pada masa covid. Pemerintah

		Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat	Desa sendiri memiliki suatu kerjasama yang baik dengan pihak swasta maupun masyarakat, sehingga dapat memanfaatkan antara satu dengan yang lainnya.
<p>Adapun titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan, kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk perbedaannya adalah terletak pada aspek pemberdayaan yang dibahas yaitu pemberdayaan masyarakat di Desa Tirtawangungan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti ini adalah lebih terfokus pada pemberdayaan kelompok tani di Desa Sri Bintan.</p>			
3	(Fairus, 2022)	Strategi Pemerintah Desa Keban Kabupaten Karimun Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sektor Budidaya Perairan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tindakan dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa keban untuk memfasilitasi sarana dan prasarana, melakukan pembinaan, dan melakukan program yang berkesinambungan. Namun dalam pelaksanaannya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa masih memiliki faktor penghambat dalam menjalankan pemberdayaan tersebut. Dan tujuan dari dilakukan strategi Pemerintah Desa Keban adalah agar terciptanya masyarakat yang mandiri
<p>Adapun titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan, kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif. untuk perbedaannya adalah terletak pada aspek pemberdayaan yang dibahas yaitu pemberdayaan masyarakat di Desa Keban Kabupaten Karimun, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti ini adalah lebih terfokus pada pemberdayaan kelompok tani di Desa Sri Bintan.</p>			

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Dari tinjauan tersebut dapat diperoleh titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan, kemudian menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. untuk perbedaannya adalah terletak pada aspek pemberdayaan yang dibahas, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti ini fokusnya lebih kepada bagaimana peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan dengan menggunakan teori peran Pemerintah yang

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani – (Sugiarno.et.al.)  
dikemukakan oleh Arif dalam (Raintung et al., 2021) dengan empat indikator peran pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator.

### 1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Dengan adanya indikator terkait peran Pemerintah Desa sebagai regulator sudah semestinya dari pihak Pemerintah Desa melakukan penjelasan tentang apa itu aturan-aturan ataupun regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan petani. Dari penjelasan tersebut maka masyarakat sedikit demi sedikit dapat memahami dan mempunyai bekal untuk prosedur serta mekanisme dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat yang berada dalam keanggotaan kelompok tani mengetahui terkait apa saja program-program pemberdayaan yang dilaksanakan dan tidak menyalahkan Pemerintah Desa Sri Bintang apabila ada yang belum sesuai yang diharapkan.

Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator yaitu sudah ada program-program yang dilakukan oleh Desa Sri Bintang dalam menjalankan perannya di tahun 2022 kepada masyarakatnya yang tergabung dalam kelompok tani dengan dibantu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintang (DKPP) dalam pelaksanaannya.

### 2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah Desa sebagai indikator dalam Dinamisator Peran Pemerintah adalah suatu dinamika yang dipahami Pemerintah Desa sebagai upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat bergerak dan berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk menjaga dan memajukan dinamika pembangunan daerah setempat, dan Desa Sri Bintang menjadi bagiannya. Peran Pemerintahan Desa sebagai sebuah dinamika kemudian dijabarkan dalam beberapa aspek, yaitu (1) sosialisasi (2) pendampingan, (3) pelatihan, dan (4) kunjungan lapangan:

#### a. Sosialisasi

Peran Pemerintah Desa Sri Bintang Sebagai Dinamisator dalam kegiatan sosialisasi untuk kelompok Tani yang ada di Desa Sri Bintang masih belum maksimal karena sosialisai yang dirasakan oleh kelompok taninya belum semua kelompok mendapatkan sosialisai tersebut dimana sosialisainya masih jarang dilakukan.

Tabel 4.4 Sosialisasi Untuk kelompok Tani 2022

No	Nama Sosialisasi	Bentuk/Jenis	Kelompok Tani	Peran Pemerintah Desa
1	Sosialisasi pengadaan pupuk subsidi	Pembagian kartu tani, bagaimana mekanisme pupuk subsidi, kelengkapan berkas, serta pendistribusian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jati Mulyo</li> <li>• Sekuning Makmur</li> <li>• Mekar Jaya</li> <li>• Poyotomo Makmur</li> <li>• Sri Rezeki</li> </ul>	Langkah awal yang dilakukan dalam sosialisasi kepada masyarakat kelompok tani adalah mengajak dan membimbing mereka untuk lebih kompak supaya perolehan pengadaan

		untuk perolehan barang tersebut		pupuk subsidi tersebut dapat merata
--	--	---------------------------------	--	-------------------------------------

Sumber: (Wawancara dengan Pemerintah Desa Sri Bintang pada tanggal 6 Juli 2023, dan dengan kelompok tani pada tanggal 8 Juli 2023).

Tabel di atas memperlihatkan bahwa untuk kegiatan sosialisasi di peran Pemerintah Desa sebagai dinamisator pada tahun 2022 ada di berikan kepada kelompok tani di Desa Sri Bintang oleh Desa bersama penyuluh lapangan pertanian. sosialisasi yang dilakukan adalah berkaitan dengan akan adanya pengadaan pupuk subsidi yaitu untuk bagaimana proses cara pengambilannya dan bagaimana untuk sistem pembagiannya apakah ditentukan untuk batas pengambilannya atau tidak. Didalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan penggunaan kartu tani untuk mendapatkan bantuan tersebut yang dihadiri oleh beberapa kelompok tani yang ada di Desa Sri Bintang. Awal sebelum sosialisasi dilakukan Pemerintah Desa Sri Bintang sudah lebih dulu berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk pengadaan pupuk subsidi kepada kelompok tani di Desa Sri Bintang.

#### b. Pendampingan

Peran pemerintah Desa untuk pendampingan sudah dilakukan namun belum maksimal, karena Pemerintah Desa hanya mengandalkan petugas penyuluh lapangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, untuk pendampingan masyarakat kelompok tani. dalam melaksanakan tugasnya dan pendampingan yang dilakukannya tidak merata ke kelompok taninya.

Tabel 4.5 pendampingan ke kelompok tani 2022

No	Pendampingan	Bentuk/jenis	Kelompok Tani	Peran Pemerintah Desa
1	Penempatan penyuluh lapangan di Desa Sri Bintang	Tata cara pembuatan kelompok yang benar dan pengelolaan hasil pertanian	Seluruh kelompok tani Desa Sri Bintang	Berkoordinasi dengan Dinas untuk membantu mereka Pemerintah Desa Sri Bintang dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat kelompok taninya dalam menjalankan usaha taninya.

Sumber: (Wawancara dengan Pemerintah Desa Sri Bintang pada tanggal 6 Juli 2023 dan dengan kelompok tani pada tanggal 8 Juli 2023)



Pendampingan di kelompok tani sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk perannya di tahun 2022 oleh penyuluh lapangan yang ditempatkan di Desa Sri Bintang oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bintang. Dari penelitian yang telah dilakukan memang benar bahwa untuk penyuluh lapangan yang di tempatkan di Desa Sri Bintang memberikan pendampingan kepada seluruh kelompok tani yang ada di Desa Sri Bintang namun dalam pendampingannya tidak secara rutin di lakukan kepada kelompok tani, baik itu dari Pemerintah Desa maupun dari Penyuluh lapangan itu sendiri. Biasa pendampingan akan dilakukan apabila ada program yang akan diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada kelompok taninya.

#### c. Pelatihan

Pelatihan merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan untuk memberikan pemahaman, ataupun penjelasan lebih lanjut pada suatu pengetahuan

Tabel 4.6 Pelatihan kepada kelompok tani 2022

No	Bentuk Pelatihan	Kelompok tani	Peran Pemerintah Desa
1	Penyambungan Bibit Durian	Jati Mulyo	Berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintang bahwa di Desa Sri Bintang perlu diadakan pelatihan kepada kelompok taninya untuk menambah pengetahuan dibidang pertanian.

Sumber: (Wawancara dengan Pemerintah Desa Sri Bintang tanggal 6 Jul 2023 dan dengan kelompok tani pada tanggal 8 Juli 2023)

Tabel di atas adalah bentuk pelatihan yang dilaksanakan kepada kelompok tani di tahun 2022 dimana sudah dilakukan pelatihan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk penyambungan bibit durian kepada salah satu kelompok tani sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh Desa Sri Bintang yang dibantu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk menambah ilmu, wawasan, pengetahuan serta pengalaman kepada masyarakat Desa Sri Bintang yang tergabung di kelompok taninya. Dari pelaksanaannya memang dari kelompok tani yang mengikuti pelatihan tersebut mengatakan mereka memperoleh hasil yang sudah sesuai dengan tujuan awal diadakan pelatihan tersebut, yaitu menambah pengetahuan.

#### 4. Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk meninjau atau melihat bagaimana kondisi suatu lahan atau suatu tempat untuk diperhatikan dan dilakukan pengawasan. Salah satunya adalah peninjauan kepada kelompok tani, yaitu kelompok tani Desa Sri Bintang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang sudah dilakukan, terdapat perbedaan anggapan antara masing-masing informan untuk kunjungan lapangan. Baik itu Pemerintah Desa dan anggota kelompok taninya. Seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa Pemerintah Desa untuk kunjungan ke

kelompok tani memang dilakukan namun, pada kenyataannya menurut beberapa anggota kelompok tani di Desa Sri Bintan mengatakan bahwa untuk kunjungan lapangan dari Pemerintah Desa ataupun melalui Desa yang berkoordinasi dengan PPL dari Dinas yang memang ditempatkan di Desa Sri Bintan, itu memang jarang ditemui, sehingga masyarakat beranggapan bahwa untuk kunjungan lapangan masih kurang sesuai.

berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, untuk indikator peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator masih belum berjalan dengan baik karena diverikasi dari hasil wawancara dengan kelompok tani dan dari wawancara dengan Kepala Desa apa yang disampaikan oleh keduanya masih ada perbedaan anggapan dari kelompok tani dan pihak yang melakukan pemberdayaan yaitu Pemerintah Desa Sri Bintan sendiri.

### 3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Berdasarkan observasi dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti, peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator sudah menjalankan perannya untuk pemberian fasilitas, namun hal tersebut tidak dirasakan oleh keseluruhan kelompok taninya. Sebab mereka tidak menyadari bahwa pelayanan seperti pengadministrasian dan tempat berkumpul yang disediakan oleh desa adalah bentuk fasilitas yang diberikan. Kelompok tani menganggap bahwa desa tidak memfasilitasi mereka. Kemudian untuk bantuan memang belum ada diberikan oleh desa kepada kelompok taninya, karena bantuan yang didapat oleh kelompok tani berasal dari Dinas langsung dan desa membantu untuk proses perolehannya. Padahal sebenarnya desa yang berkoordinasi dengan dinas untuk pengadaan bantuan tersebut Namun dari kelompok taninya tidak menyadari hal tersebut, sehingga mereka dari kelompok tani menyimpulkan bahwa desa tidak membantu apa-apa dan seolah olah tidak memperhatikan kelompok taninya.

Tabel 4.7 Bantuan program pemberdayaan kelompok tani tahun 2022

No	Nama Bantuan	Bentuk/jenis	Kelompok tani	Peran Pemerintah Desa
1	Pupuk subsidi	Pengadaan pupuk	-Jati Mulyo -Poyotomo Makmur -Sekuning makmur -mekar jaya -Sri rezeki	Melanjutkan pengajuan proposal dari kelompok tani ke Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian untuk pengadministrasian
2	Alat pertanian	Traktor	-Mekar Jaya	Berkoordinasi dengan pemberi fasilitas bahwa alat tersebut memang benar dibutuhkan oleh kelompok tani Desa Sri Bintan

3	Ketahanan Pangan	Pemberian benih bibit cabe, terong, dll	Kwt Sumber rezeki	Memberikan benih dan membeli hasil bibit dari benih yang sudah diberikan oleh Desa Sri Bintang, untuk diberikan kembali ke masyarakat termasuk kelompok tani itu sendiri.
---	------------------	---	-------------------	---

Sumber : (Wawancara dengan pemerintah Desa pada tanggal 6 Juli 2023, dan wawancara dengan kelompok tani Desa Sri Bintang 8 Juli 2023)

Dari tabel di atas sebagai fasilitator peran Pemerintah Desa Sri Bintang ditahun 2022 sudah terlihat memberi dan melaksanakan perannya sebagai fasilitator untuk hal bantuan yang diberikan kepada kelompok tani yang ada meskipun tidak keseluruhan dari bantuan yang diberikan berasal dari Desa Sri bintang itu sendiri, untuk bantuannya seperti membantu pengadaan pupuk subsidi, alat pertanian, pemberian benih bibit cabe, terong, dll melalui program ketahanan pangan. Kemudian juga pembuatan dan juga pengajuan proposal ke Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian untuk pengadministrasian, Membantu kelompok tani dalam Berkoordinasi dengan pemberi fasilitas bahwa alat tersebut memang benar dibutuhkan oleh kelompok tani Desa Sri Bintang, selanjutnya memberikan benih dan membeli hasil bibit dari benih yang sudah diberikan oleh Desa Sri Bintang untuk diberikan kembali ke masyarakat termasuk kelompok tani itu sendiri. Dan hal tersebut memang ada dirasakan beberapa oleh kelompok taninya yang berada di dalam tabel diatas berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan.

#### 4. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Berdasarkan observasi dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti, peran Pemerintah Desa sebagai katalisator jika dilihat melalui observasi dan hasil wawancara yang peneliti lakukan masih belum terlaksana dengan baik karena Pemerintah desa kurang memperhatikan hal-hal yang dapat mendorong laju sumber daya manusia yang unggul, serta kurangnya penyediaan modal.

### Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pembahasan terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintang, Pada aspek peran Pemerintah Desa sebagai Regulator sudah melakukan perannya untuk pembentukan kelompok tani dalam pemberdayaan masyarakatnya yang bertani, sebagai langkah untuk memecahkan masalah di bidang pertanian, yang kemudian dilakukan pembuatan dan penerbitan SK untuk kelompok tani tersebut, dengan dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintang yang memiliki kewenangan untuk perlindungan dan pemberdayaan pada petani agar pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari Pemerintah yang diturunkan dari pusat dan Daerah dapat terlaksana.

Pada aspek peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator Pemerintah Desa Sri Bintang sudah melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani yang ada di

Desa Sri Bintan melalui beberapa aspek yang terdiri dari sosialisasi, pendampingan, pelatihan, dan kunjungan lapangan dengan berkoordinasi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk membantu pelaksanaan pemberdayaannya. Juga untuk penyediaan tenaga ahli bidang pertanian.

Pada aspek peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator untuk menciptakan dan menyediakan ruang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kelompok taninya, baik sarana dan prasarana serta sumber daya alam dan sumber daya manusianya, Pemerintah Desa Sri Bintan sudah menjalankan perannya sebagai fasilitator seperti bantuan sarana berbentuk kendaraan pick up, dan prasarana seperti ruangan untuk digunakan mereka kelompok tani dalam kegiatan seputar pertanian. Untuk mengurus kelanjutan pengadministrasian pengajuan proposal dari kelompok tani, dll.

Pada aspek peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator yang menjadi agen untuk mempercepat pengembangan potensi desa, dengan melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan, juga sudah dilaksanakan. Namun belum terlaksana sepenuhnya dengan baik yaitu dari Pemerintah Desa masih kurang memperhatikan hal tersebut.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Rosidin, U. (2019). *Pemberdayaan Desa: Dalam Sistem Pemerintahan Daerah* (cetakan 1). cv pustaka Setia.
- Usman, S. (2012). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (cetakan VI). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.

### **Skripsi dan Jurnal:**

- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Tadanugi, I. N. (2018). Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 10 Nomor 1, 69.
- Widarni, R. T. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Maritim Raja Ali Haji.
- Liwu, A. S., & Sasmito, C. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *JISIP - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 228–233.
- Pebriyani, D., & Hermawan, E. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Inovasi Penelitian*, 1(3), 197–206.
- Fairus, M. (2022). Strategi Pemerintah Desa Keban Kabupaten Karimun Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sektor Budidaya Perairan. Maritim Raja Ali Haji.

Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Govenance*, 1(2), 1–9.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6, 1 (2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Pub. L. No. 44, 44 1 (2014).